

Integrasi dan Dissintegrasi dalam Wacana Politik Indonesia: Menjadi Atau Tidak Menjadi Indonesia?

Stepi Anriani

BERhadapan dengan situasi Indonesia yang kian hari kian runyam, seperti isu mafia kasus, *centurygate*, separatisme, korupsi, 'seteru' para elite politik, ketidakpastian hukum, busung lapar, dan bencana alam di berbagai penjuru tanah air, ternyata menimbulkan beragam pertanyaan dan komentar. Rochman Achwan, Sosiolog, dosen Pascasarjana FISIP-UI, adalah salah seorang dari sekian banyak warga Indonesia yang pernah berkomentar tentang situasi tersebut. Ia mengatakan bahwa Indonesia sementara ini sedang melakukan sebuah ekspedisi menuju dua dunia paling berbahaya, *dissintegrasi bangsa* ataukah *integrasi baru*, kendatipun harus melalui begitu banyak kendala?

Sebelum pertanyaan ini dijawab, terlebih dahulu penulis mengedepankan tentang konsep bangsa menurut Achwan. Selanjutnya, penulis mencoba mensejajarkan konsep tersebut dengan pengertian kelompok sosial yang didasarkan pada batasan *gemeinschaft* Ferdinand Tönnies. Bangsa adalah suatu bentuk solidaritas kolektif yang muncul di Eropa Barat di Zaman Pencerahan sejalan dengan

Stepi Anriani
Mahasiswa Unpad Fakultas
Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fisip)
Jurusan Ilmu Pemerintahan
tahun 2005. Kini melanjutkan di
Magister Ketahanan Nasional,
FISIP Universitas Indonesia
2011.

merosotnya legitimasi Sistem Feodalisme. Menurut Achwan, sebuah bangsa dibentuk oleh unsur kebudayaan, sejarah, dan warisan tradisi lain yang pernah ada sebelumnya. Dikatakan sebagai suatu solidaritas kolektif karena memiliki lambang-lambang budaya sendiri seperti bahasa yang digunakan dalam wilayah teritorial tertentu, yang sebenarnya mencerminkan suatu kesatuan. Oleh karena itu, konsep bangsa menonjolkan persaudaraan dan atau kebersamaan. Dimana, kebersamaan ini akan membentuk suatu komunitas politik, bangsa, dan negara yang senantiasa mengalami proses rekonstruksi terus menerus sepanjang sejarah perkembangannya. Hal ini hendak menunjukkan bahwa bangsa dan negara bukanlah entitas yang statis.

Asas persaudaraan ini dijaga oleh institusi negara yang memiliki kemampuan menjangkau segenap anggota dari suatu bangsa. Fungsi lain dari suatu bangsa adalah merumuskan dan menegakkan aturan main, entah dalam kehidupan ekonomi, dan politik, maupun kemasyarakatan yang disepakati oleh anggotanya. Pada dasarnya merupakan suatu bentuk solidaritas kolektif yang mana lebih menonjolkan elemen kebersamaan dan tidak menyoroti masalah ketidaksamaan ataupun eksploitasi.

Berbicara mengenai bangsa tidak terlepas dari kata nasionalisme, dalam pendekatan konstruktivis. Nasio-

nalisme merupakan ideologi yang bermuatan psikologis dan bernuansa mitos politis. Menurut pandangan ini, nasionalisme adalah identitas nasional yang dibangun dengan dasar kerangka institusional dan dirumuskan secara sederhana dan simplistis untuk mendiagnosa masalah-masalah kontemporer. Dapat diajukan contoh disini, bahwa pernah muncul istilah Kebangkitan Nasional Kedua untuk memberi makna dalam peringatan setiap tanggal 20 Mei pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Gejala seperti ini termasuk upaya disengaja untuk menguatkan nasionalisme Indonesia. Biasanya, ungkapan-ungkapan sloganistis. Dalam pendekatan primordialis, nasionalisme dilandasi pada sebuah masyarakat organik dan alamiah. Cerminannya adalah kekuatan emosional yang etnosentris, misalnya dengan mengatakannya bahwa mereka atau bangsa itu merasa berasal dari nenek moyang yang sama (*common ancestry*). Demikian pula mitos yang berkembang mengenai asal-usul yang sama (*myths of common origin*). Jika tarikan ke nasionalisme konstruktif yang ideologis sifatnya psikologis dan mitos politis, maka tarikan ke primordialis bersifat instinktif. Pendekatan situasionalis memerankan bahwa identitas etnik dan identitas kebangsaan merupakan sumber daya yang diolah oleh kelompok individu dalam rangka memenuhi kepentingan bersama.

Dalam konteks perubahan yang melahirkan tantangan dan peluang, masyarakat memiliki sejumlah pilihan dan jawaban untuk mengatasi situasi permasalahan yang dihadapi. Pendekatan ini dapat menjelaskan masalah-masalah yang ditimbulkan dari situasi-situasi ketimpangan ekonomi dan kekuasaan. Situasi itu dapat menimbulkan gerakan etnik dan nasionalis untuk mempertahankan identitasnya. Pendekatan primordialis dapat menerangkan mengapa nasionalisme diterjemahkan sebagai identitas yang kental atau padat. Sedangkan pendekatan situasionalis menerangkan bahwa nasionalisme sebagai suatu identitas yang cair. Ini dapat dimengerti karena pada sudut primordialis, nasionalisme diikat dengan kesetiaan emosional. Sedangkan pada sudut situasionalis pengertian nasionalis didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang bersifat situasional. Tarik-menarik antara sudut pandang konstruktivis dan situasionalis terlihat pada, yang pertama bersifat ideologis (kepercayaan yang dianggap benar sehingga harus diperjuangkan), dengan sudut situasionalis yang didasarkan pada rasionalitas.

Munculnya gejala disintegrasi sosial dan disintegrasi nasional boleh jadi karena aspirasi lokal atau daerah ke permukaan, mampat. Nasionalisme negara terlalu kuat menekan kepada nasionalisme yang bersifat primordialis yang pada prinsipnya memang hidup. Demikian pula nasio-

nalisme negara kurang memperhatikan perkembangan di dalam masyarakat, yang karena munculnya berbagai kepentingan, tidak tertampung di dalam perwujudan nasionalisme negara.

Konflik yang bermuatan kesukubangsaan memang bukan monopoli di Indonesia saja. Ketegangan itu lazim juga terjadi di Asia Tenggara mulai dari yang permanen seperti di Burma (Myanmar) sampai yang ekspresinya tenang, seperti di Singapura. Menurut Brown munculnya kesadaran kesukubangsaan dipengaruhi atau berkaitan dengan struktur kekuasaan. Ketidakadilan yang diperlihatkan oleh sebuah kekuasaan berakibat pada masyarakat sukubangsa yang merasa dirugikan atau didzalimi. Dalam konteks itu, kesukubangsaan menjadi kendaraan untuk mengejar kepentingan-kepentingan baik dalam aspek ekonomi dan politik. Pelaksanaan UU Otonomi Daerah memberi peluang besar bagi daerah untuk mengelola potensinya, untuk kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, dua gejala yang mencolok kini yaitu elite yang lebih mementingkan dirinya sendiri, dan kedua, terlalu kuatnya semangat kedaerahan, harus juga diakomodir menjadi suatu kelebihan untuk kepentingan bangsa, bukan sebaliknya kedaerahan, sehingga memicu disintegrasi.

Kegelisahan Prof. Azyumardi Azra bahwa Pancasila sebagai faktor integratif bangsa mengalami kemero-

sotan selama era reformasi (Kompas, 10/6/2008) menarik untuk ditanggapi. Benarkah premis bila peremajaan Pancasila terus diabaikan, dasar persatuan dalam kemajemukan bangsa akan goyah? Ketika konflik sosial kekerasan meluas, dengan memanipulasi perbedaan agama, budaya, etnis, dan kesenjangan, maka muncul kekhawatiran akan luruhnya integrasi bangsa.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada dasarnya merupakan tekad politik bangsa untuk mengelola berbagai macam keanekaragaman, menjadi kekuatan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Karena itu, diperlukan suatu dasar negara yang memungkinkan realitas keanekaragaman tetap terjaga, dinamis, dan harmonis. Melalui ijtihad politik, Bung Karno menggalinya dari berbagai pemikiran filsafat dan keagamaan, yang disintesiskan menjadi Pancasila, 59 tahun lalu.

Peluruhan Pancasila

Disadari atau tidak, kehidupan politik yang belum menemukan bentuknya yang mapan pada hakikatnya mempunyai andil bagi proses peluruhan nilai-nilai fundamental Pancasila, baik sejak pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi. Peluruhan terjadi melalui kebijakan politik

pemerintah yang ternyata tidak konsisten dalam menjalankan dan mewujudkan cita-cita Pancasila, sehingga terjadilah kesenjangan yang makin lebar antara cita-cita sosial dan realitas faktual.

Akibatnya, cita-cita yang terkandung dalam Pancasila semakin jauh dari kenyataan sehari-hari, karena keadilan sosial semakin sulit terwujud, dan tidak ada hubungannya antara kesadaran teologis dengan perilaku sosial politik yang korup, padahal agama mana pun mengajarkan kesalihan sosial. Sementara itu, kekuasaan ternyata hanya beredar di kalangan elite politiknya saja, yang bermusyawarah untuk bagi-bagi kekuasaan di kalangan mereka sendiri, dengan menyatakan diri sebagai wakil rakyat tetapi mengabaikan kepentingan rakyatnya sendiri. Akibatnya, kehidupan kemanusiaan kita terkoyak-koyak oleh konflik berkepanjangan dan melancarkan ancaman disintegrasi bangsa.

Kegamangan Reformasi

Kita tidak bisa membiarkan perjalanan bangsa ke depan tanpa dasar pijakan ideologis yang kuat terhadap pembelaan nasib rakyat yang selama ini terpinggirkan oleh politik kekuasaan elitnya. Mau tidak mau, kita harus kembali membicarakan aktualisasi Pancasila sebagai dasar NKRI dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara, agar Pancasila tidak menjadi slogan kosong dan alat legi-

timasi kekuasaan belaka, yang akhirnya akan meluruhkan Pancasila sebagai ideologi politik berbangsa dan bernegara.

Kekuatan Pancasila sesungguhnya terletak pada ide sintetiknya yang secara cerdas mampu menyerap realitas plural Indonesia dalam kemasan ideologi politik yang kompromistik, sehingga semua unsur kebangsaan merasa terwakili di dalamnya. Akan tetapi, realitas kehidupan yang ada, ternyata juga menunjukkan jarak yang semakin lebar antara cita-cita dan fakta. Fakta adalah koreksi, sehingga ideologi politik yang tidak mampu mewujudkan cita-cita sosialnya secara faktual, dengan sendirinya akan terkoreksi dan batal.

Dalam konsep NKRI, Pancasila adalah sudah final. Tidak ada lagi ruang untuk menggugat keabsahannya sebagai dasar negara. Jika Pancasila digugat, artinya eksistensi NKRI dipertanyakan kembali. Sungguh pun demikian, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap realitas kehidupan rakyat, yang merasakan tidak nyaman hidupnya di dalam negerinya sendiri. Besarnya kemiskinan, pengangguran, dan terjadinya gangguan keamanan amat mengganggu ketenangan hidup rakyat. Bagaimana risanya melihat negara yang kaya, dengan sumberdaya alam yang dimilikinya, tetapi ternyata penduduknya miskin, menganggur dan tidak nyaman. Semua ini sesungguhnya berkaitan dengan soal manajemen politik negara.

Manajemen Politik dan Integrasi Bangsa

Reformasi telah berhasil mengubah tatanan politik dengan menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung. Perubahan ini secara fundamental akan memberikan hak-hak politik rakyat yang semakin jelas, karena nasib rakyat akan ditentukan oleh para pemimpinnya, dan seorang pemimpin negara secara langsung akan dipilih dan ditentukan oleh rakyatnya. Dengan demikian, rakyatlah yang akan menentukan nasibnya sendiri dalam menentukan kepemimpinan nasional. Inilah tantangan integrasi bangsa sesungguhnya, apakah pemimpin pilihan rakyat akan menunjukkan kepemimpinan secara utuh, terlepas dari partai mana ia berasal, integrasi bangsa akan dipengaruhi oleh realitas manajemen politiknya. Manajemen politik yang mampu mengelola dan mengolah kekayaan negara yang amat besar secara adil untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, memberikan perlindungan keamanan, kedamaian, dan mencerdaskan kehidupan rakyat, dengan sendirinya akan memperkuat integrasi bangsa.

Sebaliknya jika gagal, maka taruhannya adalah disintegrasi bangsa akan meluas. Karena itu, manajemen politik selalu berkaitan dengan sistem dan kepemimpinan, dan kita sesungguhnya memerlukan seorang pemimpin yang dapat bekerja secara sistematis, visioner dan mampu me-

menuhi harapan rakyatnya, juga pergaulan dunia global.

Melalui pemilihan presiden secara langsung, maka manajemen politik itu akan dikuasakan pada presiden terpilih. Karena itu, Pemilu yang jujur, adil, dan bebas harus dapat dilakukan dengan baik, karena persoalan integrasi bangsa akan ditentukan dari sini. Kekuasaan ada di tangan rakyat, rakyat akan bersatu untuk menentukan nasibnya sendiri melalui seorang presiden yang dipilihnya sendiri, dan kemudian menyerahkan mandatnya kepada presiden terpilih. Rakyat seharusnya memperoleh informasi yang lengkap tentang pemimpinnya, agar tidak salah memilih seorang pemimpin negaranya, karena kesalahan memilih akan berdampak langsung pada kehidupan rakyat sendiri.

Integrasi bangsa adalah landasan bagi tegaknya sebuah negara modern. Keutuhan wilayah negara amat ditentukan oleh kemampuan para pemimpin dan masyarakat warga negara memelihara komitmen kebersamaan sebagai suatu bangsa. Karena itu, secara teoretik dipahami bahwa ancaman paling serius terhadap integrasi bangsa adalah *disharmoni sosial*, sedangkan ancaman paling nyata terhadap eksistensi wilayah negara adalah *gerakan separatisme*.

Kedua ancaman itu sering kali bercampur baur. Karena, disharmoni sosial yang sudah meluas men-

jadi konflik yang mengambil bentuk kekerasan, akan serta merta menarik garis-garis demarkasi teritorial. Penampakan garis-garis itu akan cepat menjadi jelas bila pihak-pihak yang terlibat konflik merupakan representasi dari komunitas-komunitas besar yang mendominasi wilayah-wilayah tertentu.

Bila ini terjadi, maka proses disintegrasi wilayah yang dimulai oleh disintegrasi sosial akan secara simultan membawa bangsa itu ke jurang disintegrasi nasional. Sebuah skenario disintegrasi bangsa selalu berlangsung melalui interaksi berbagai faktor yang lebih kompleks. Proses itu dimulai dengan lahirnya berbagai faktor penyebab dari terjadinya disharmoni sosial, bagaimana suasana disharmoni itu bergerak ke arah konflik kekerasan, faktor apa yang menghambat upaya peredaan konflik. Dalam konteks ini perlu dipahami, bangsa dan negara hanyalah sebuah konsensus. Bila konsensus tidak lagi diakui, maka eksistensi bangsa dengan sendirinya hilang, dan bersamaan dengan itu negara pun akan rontok. Manusia dan masyarakat yang sebelumnya pernah sepakat menjadi satu bangsa mungkin masih tetap eksis, tetapi mereka tidak lagi terikat dalam ikatan kebangsaan yang sama.

Demikian pula halnya dengan teritori negara yang secara fisik tetap ada, namun garis-garis demarkasi yang sebelumnya pernah diakui

bersama sudah berubah. Bila dikaji lebih mendalam, banyak faktor yang mempengaruhi namun secara gradual, ada lima (5) faktor yang bisa menjadi penyebab utama proses itu.

Pertama, krisis ekonomi yang akut dan berlangsung lama. Krisis di sektor ini selalu merupakan faktor amat signifikan dalam mengawali lahirnya krisis yang lain (politik-pemerintahan, hukum, dan sosial). Secara garis besar, krisis ekonomi ditandai merosotnya daya beli masyarakat akibat inflasi dan terpuruknya nilai tukar, turunnya kemampuan produksi akibat naiknya biaya modal, dan terhambatnya kegiatan perdagangan dan jasa akibat rendahnya daya saing. Muara dari semua ini adalah tutupnya berbagai sektor usaha dan membesarnya jumlah penganggur dalam masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, harapan satu-satunya adalah investasi melalui proyek-proyek pemerintah, misalnya, untuk pembangunan infrastruktur transportasi secara besar-besaran sebagai upaya menampung tenaga kerja dan memutar roda ekonomi. Namun, ini memerlukan syarat adanya kepemimpinan nasional yang kreatif dan terpercaya karena integritasnya, tersedianya cadangan dana pemerintah yang cukup, serta bantuan teknis melalui komitmen internasional. Tanpa terobosan investasi baru, krisis ekonomi akan berlanjut.

Biasanya, krisis ekonomi yang berkepanjangan dan tak teratasi akan menciptakan ketegangan-ketegangan baru dalam hubungan antar-elite. Mereka akan berlomba untuk saling menyalahkan dan mencari "kambing hitam". Pada saat yang sama, krisis ekonomi akan memperlemah kemampuan negara menutupi berbagai ongkos pengelolaan kekuasaan dan pemeliharaan berbagai fasilitas umum. Akibatnya, akan terbentuk rasa tidak puas yang luas, baik dari mereka yang menjadi bagian dari kekuasaan itu sendiri (pegawai negeri dan tentara/polisi), maupun warga masyarakat. Bila situasi ini tidak berhasil diatasi oleh mekanisme sistem politik yang berlaku, maka krisis politik akan sulit dihindari.

Kedua, krisis politik berupa perpecahan elite di tingkat nasional, sehingga menyulitkan lahirnya kebijakan yang utuh dalam mengatasi krisis ekonomi. Krisis politik juga bisa dilihat dari absennya kepemimpinan politik yang mampu membangun solidaritas sosial untuk secara solid menghadapi krisis ekonomi. Dalam situasi di mana perpecahan elite pusat makin meluas dan kepemimpinan nasional makin tidak efektif, maka kemampuan pemerintah dalam memberi pelayanan publik akan makin merosot. Akibatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan semakin menipis.

Kedadaan ini biasa menjadi pemicu lahirnya gerakan-gerakan massal anti-pemerintah yang terorganisasi. Bila gerakan-gerakan itu menguat dan pada saat sama lahir gerakan massa tandingan yang bersifat kontra terhadap satu sama lain-apalagi jika terjadi bentrokan fisik yang intensif di antara mereka, atau antara massa dengan aparat keamanan negara, maka perpecahan di antara top elite di pusat kekuasaan makin tak terhindarkan. Jurang komunikasi akan makin lebar. Dalam situasi dimana kebencian dan saling curiga antarkelompok sudah amat mengental, tidak ada satu pihak pun yang memiliki legitimasi untuk memprakarsai upaya rekonsiliasi. Jalan menuju rontoknya bangunan kekuasaan di tingkat pusat akan semakin lempang. Perkembangan ini secara otomatis akan mendorong penguatan potensi gerakan-gerakan separatisme. Gerakan ini bisa menguat dari wilayah yang sudah sejak lama menyimpan bibit-bibit mikro nasionalisme, bisa juga dari wilayah yang sama sekali tidak memiliki bibit itu, namun terdorong oleh kalkulasi logis mereka ketika berhadapan dengan situasi yang bersifat *fait accompli*. Yang terakhir ini merupakan kesadaran yang lahir secara kondisional dari para pemimpin di wilayah-wilayah yang relatif jauh dari pusat kekuasaan berdasarkan asumsi: daripada mengikuti pemerintahan yang sudah rontok di Pusat, lebih baik kami memisahkan diri dan menyuburkan kehidupan diri sendiri.

Ketiga, krisis sosial dimulai dari terjadinya disharmoni dan bermuara pada meletusnya konflik kekerasan di antara kelompok-kelompok masyarakat (suku, agama, ras). Jadi, dikala krisis ekonomi sudah semakin parah, yang akibatnya antara lain terlihat melalui rontoknya berbagai sektor usaha, naiknya jumlah penganggur, dan meroketnya harga berbagai produk, maka kriminalitas pun akan meningkat dan berbagai ketegangan sosial menjadi sulit di-hindari. Dalam situasi seperti ini, hukum akan terancam supremasinya dan kohensi sosial terancam robek. Suasana kebersamaan akan pupus dan rasa saling percaya akan terus menipis.

Sebagai gantinya, eksklusivisme, entah berdasar agama, ras, suku, atau kelas yang dibumbui sikap saling curiga yang terus menyebar dalam hubungan antar-kelompok. Bila berbagai ketegangan ini tidak segera diatasi, maka eskalasi konflik menjadi tak terhindarkan.

Disharmoni sosial pun dengan mudah akan menyebar. Modal sosial berupa suasana saling percaya, yang merupakan landasan bagi eksistensi sebuah masyarakat bangsa, perlahan-lahan akan hancur.

Keempat, intervensi internasional yang bertujuan memecah-belah, seraya mengambil keuntungan dari perpecahan itu melalui dominasi pengaruhnya terhadap kebijakan politik dan ekonomi negara-negara baru pascadissintegrasi. Intervensi itu ber-

gerak dari yang paling lunak, berupa pemberian advis yang membingungkan kepada pemerintah nasional yang pada dasarnya sudah kehilangan arah; ke bentuk yang agak kenyal, berupa provokasi terhadap kelompok-kelompok yang berkonflik; hingga yang paling keras, berupa suplai kebutuhan material untuk memperkuat kelompok-kelompok yang berkonflik itu.

Proses intervensi terakhir ini amat mungkin terjadi saat pemerintah nasional sudah benar-benar tak berdaya mengontrol lalu lintas informasi, komunikasi, mobilitas sosial, serta transportasi darat, laut, dan udara. Bila ini terjadi, maka jalan menuju disintegrasi semakin jelas, hanya menunggu waktu sebelum menjadi kenyataan.

Kelima, demoralisasi tentara dan polisi dalam bentuk pupusnya keyakinan mereka atas makna pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bhayangkari negara. Demoralisasi itu, pada kadar yang rendah dipengaruhi oleh merosotnya nilai gaji yang mereka terima akibat krisis ekonomi. Kemerostan itu umumnya terjadi akibat inflasi. Tetapi dalam kasus tertentu hal itu diakibatkan oleh kebijakan pemerintah untuk menurunkan gaji mereka atau membayar kurang dari 100% dan sisanya menjadi utang pemerintah.

Pada tingkat tinggi, demoralisasi itu berupa hilangnya kepercayaan mereka terhadap nilai pengabdian

setelah mengalami tekanan-tekanan psikologis yang berat dalam waktu lama akibat krisis politik yang akut. Dalam situasi seperti ini, tentara dan polisi yang seyogianya mencegah konflik social malah bisa tergiring untuk mengambil bagian dalam konflik itu dengan berbagai alasan. Secara teoretik, ketika negara tidak lagi memberi harga yang pantas terhadap pengorbanan tentara dan polisi dalam menjaga integrasi bangsa, maka tempat paling aman bagi segmen-segmen tertentu dari mereka adalah kelompok-kelompok sosial di mana mereka bisa mengidentikkan dirinya. Karena itu, demoralisasi tentara dan polisi amat rawan terhadap perluasan dan intensitas konflik sosial yang sedang terjadi. Keterlibatan yang luas dari tentara dan polisi dalam konflik sosial akan mengkonversi konflik itu sendiri menjadi perang saudara yang justru merupakan episode terakhir dari proses disintegrasi bangsa dan keruntuhan sebuah negara.

Gambaran tersebut merupakan rangkaian kejadian yang tidak selalu mengikuti urutan dari yang pertama hingga kelima. Awal dari suatu proses disintegrasi umumnya dimulai dari faktor krisis ekonomi, namun tidak berarti faktor-faktor lain tidak bisa menjadi awal, atau dua faktor terjadi secara simultan sebagai awal dari proses disintegrasi bangsa dan bubarnya sebuah negara. Dalam pengalaman sejarah pemerintahan modern, awal krisis adalah kegagalan

kepemimpinan. Krisis ekonomi yang sering dilihat sebagai awal, biasanya terjadi karena kegagalan pemimpin pemerintahan mengantisipasi kemungkinan krisis atau kalau krisis ekonomi itu benar-benar datang secara tiba-tiba, maka berlanjutnya krisis itu disebabkan oleh kegagalan pemimpin pemerintahan dalam mengatasinya.

Untuk yang terakhir ini, suatu proses dissintegrasi hanya bisa dicegah jika mekanisme politik yang berlaku mampu secara cepat mengganti pemimpin pemerintahan yang gagal itu dengan yang lebih baik. Pergantian pemimpin pemerintahan pada waktu yang tepat akan membuka ruang bagi lahirnya kepercayaan baru, harapan baru, dan konsensus-konsensus baru untuk kelangsungan hidup suatu bangsa dan tetap tegaknya sebuah negara. Kepemimpinan baru yang efektif dalam mengatasi krisis ekonomi, akan memperoleh kepercayaan dan karena itu berpotensi besar mencegah berlanjutnya krisis politik dan sosial, menahan intervensi internasional, dan mencegah berlanjutnya demoralisasi tentara dan polisi. Peluang untuk sebuah solusi kepemimpinan seperti ini hanya terbuka jika dilakukan di awal krisis ekonomi, sehingga krisis yang lain belum menyusul. Bila krisis ekonomi sudah terlalu akut, krisis politik sudah merebak, dan krisis sosial sudah membusuk, pemimpin sehebat apa pun akan sulit diharapkan menghentikan proses dissintegrasi bangsa

dan runtuhnya bangunan sebuah negara. Dalam keadaan seperti itu, hanya sebuah keajaiban yang bisa mencegah terjadinya skenario di atas. Karena itu, integrasi bangsa sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari manajemen politik bangsa, sehingga Pancasila tidak lagi menjadi slogan politik yang memakan korban rakyatnya sendiri, tetapi teraktualisasikan dalam tradisi politik demokrasi, di mana kekuasaan ada di tangan rakyat.

Menjadi atau Tidak Menjadi Indonesia?

Merujuk pada pertanyaan di atas. Untuk apa, suku-suku bangsa yang ada di wilayah Nusantara, mulai dari Aceh hingga Papua, membentuk diri menjadi sebuah bangsa bernama Indonesia, dan membentuk negara bernama Republik Indonesia. Siapakah yang menentukan bahwa Indonesia itu adalah Aceh, Batak, Minang, Betawi, Jawa, Bugis, Ambon, Papua dan seterusnya? Siapa yang menentukan bahwa wilayah Indonesia itu adalah dari Sabang sampai Merauke, dan seterusnya?

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) seorang pemikir negara abad ke-17 mencoba menerjemahkan pertanyaan-pertanyaan di atas dalam suatu formulasi pembentukan negara dalam konsepnya yang terkenal, Kontrak Sosial (*Du Contract social ou principes du droit politique*) yang di buat pada 1762. Rousseau melihat

hubungan individu dengan negara haruslah didasari pada sebuah kesepakatan untuk bernegara sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan bersama.

Dalam uraiannya, Rousseau menekankan pentingnya istilah *volente generale* (kehendak umum) yang merupakan cikal bakal lahirnya masyarakat sipil. Sebuah negara haruslah didasarkan pada kesepakatan umum yang jika dilanggar akan mengakibatkan ketidakadilan. Konsep ketidakadilan, dengan sendirinya membubarkan kesepakatan umum dan juga kontrak sosial. Gagasan Rousseau tentang kehendak umum sebagai dasar terbentuknya negara juga didukung oleh Emmanuel Kant pemikir Inggris abad ke-17, (1725-1804).

Artinya, kesepakatan umum dan kontrak sosial merupakan dasar yang diambil bersama oleh orang-orang Aceh, Batak, Minang, Betawi, Jawa, Bugis, Ambon, Papua dan seterusnya itu yang menentukan mereka menjadi Indonesia atau bukan. Kontrak sosial dan *volente generale* itulah yang seharusnya menentukan kesepakatan "hidup bersama" itu, baik secara bentuk, maupun model. Misalnya saja, pada waktu Indonesia masih bernama Republik Indonesia Serikat, pada saat itu kebanyakan wilayah suku-bangsa tidak disebut provinsi, tetapi disebut sebagai "negara" bagian, jadi Indonesia waktu itu bersepakat menjadi kumpulan

negara-negara dari berbagai suku bangsa, dan kemudian berubah lagi menjadi provinsi-provinsi di sebuah negara bernama Indonesia. Sejarah ini, mengajarkan kepada kita betapa relatifnya kesepakatan itu.

Konsekuensinya, berakhirnya kesepakatan, atau terlanggarnya kontrak sosial akan berakibat pada lahirnya ketidakadilan, dan ketidakadilan akan menjadi faktor penting terhadap terjadinya apa yang disebut dengan disintegrasi. Dengan kata lain, integrasi dimulai dari kontrak sosial dan kesepakatan bersama, sementara disintegrasi dimulai dari saat dilanggarnya kontrak sosial dan kehendak hidup bersama itu. Artinya, kontrak sosial juga bersifat terbuka dan relatif. Dia dengan sendirinya akan kehilangan legitimasi, apabila kehendak bersama yang telah disepakati, secara sadar atau tidak, secara rela atau terpaksa memang sudah tidak ada lagi.

Lalu, apakah sebenarnya yang menjadi inti kehendak bersama dalam suatu negara yang menjadi tujuan dan sekaligus muatan kontrak sosial yang harus dijadikan jaminan bakal diwujudkan keadilan? Ada banyak teori negara yang bisa menjelaskan ini, tetapi setidaknya hal itu bisa dilihat dari konsep yang diajukan Rousseau, bahwa kehendak umum atau kehendak bersama bertalian dengan prinsip-prinsip yang merupakan dasar kehidupan demokratis, yaitu;

- Rakyat adalah berdaulat; yakni merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Karena prinsip ini, demokrasi berarti bahwa rakyat memerintah dirinya sendiri. Rakyat adalah sekaligus atasan dan bawahan (Prinsip-prinsip demokrasi).

- Dalam negara tiap-tiap orang harus dihormati menurut martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu hak untuk bereksistensi setiap orang harus dijamin. Kepada orang jahat pun hak ini harus diberikan. (Hak Asasi Manusia).

- Tiap-tiap warganegara berhak untuk ikut membangun hidup bersama dalam negara, yaitu mempunyai hak publik. Semua usaha untuk mengucilkan seorang atau sekelompok orang dari kehidupan masyarakat harus ditolak. Hak-hak publik manusia hanya dapat dihilangkan, apabila norma-norma kehidupan masyarakat dilanggar olehnya. (Jaminan Hukum dan Ekonomi).

Konsep ini menjelaskan kepada kita, bahwa selain soal keadilan, hilangnya prinsip-prinsip demokrasi dalam sebuah negara, juga bakal menjadi ancaman bagi integrasi sebuah bangsa atau negara. Demikian juga soal-soal yang berhubungan dengan jaminan hak-hak asasi manusia serta jaminan atas kehidupan ekonomi dan jaminan hukum yang adil dan tidak memihak. Dari sini juga

jelas bahwa kontrak sosial mensyaratkan adanya jaminan HAM, jaminan hukum, jaminan kesejahteraan ekonomi dan sosial serta berjalannya prinsip-prinsip demokrasi. Secara umum, kesepakatan membentuk negara bertumpu pada prinsip-prinsip, keadilan, kesejahteraan, perdamaian dan kebersamaan.

Hal ini bisa dilihat dari konsep yang ditawarkan Christian Wolff (1679-1754), bahwa kebutuhan individu terhadap negara lebih ditentukan oleh faktor-faktor;

1. Supaya hal-hal yang diperlukan untuk suatu hidup bahagia (*vitae sufficientia*) diperoleh; yakni, melalui produksi barang dan jasa.
2. Supaya ketenteraman dalam hidup bersama (*tranquillitas civitatis*) bisa diwujudkan.
3. Supaya keamanan dan kedamaian dalam negara (*securitas*) bisa dipertahankan.

Kesimpulannya, negara dibutuhkan untuk menjamin suatu hidup bahagia, tenteram dan damai. Hidup semacam ini, oleh Wolff disamakan dengan makna kesejahteraan umum. Artinya, selain keadilan, jaminan hukum, jaminan HAM, kesejahteraan sosial ekonomi dan lain-lain, harus disempurnakan dengan adanya ketenangan, kebahagiaan, dan jaminan atas semua itu.

Pertanyaannya; apakah muatan kontrak sosial Aceh-Indonesia, atau

Papua-Indonesia, Jawa-Indonesia, Batak-Indonesia dan seterusnya itu, telah setidaknya memenuhi konsep-konsep dasar yang dibutuhkan bagi adanya suatu kesepakatan bersama itu? Atau adakah prinsip-prinsip dasar dari kontrak sosial seperti tersebut di atas telah dilanggar atau tidak, telah dipenuhi atau tidak? Lalu, adakah jaminan atas semua itu telah dimiliki dalam pelaksanaan bernegara. Jawaban atas semua itulah yang akan menentukan nilai dan masa depan dari sebuah harapan integrasi yang utuh. Sebuah integrasi yang tidak datang dari kekuasaan senjata atau rezim, tetapi integrasi yang lahir dari kesadaran bersama, kebutuhan bersama, cita-cita yang sama, dan kepentingan yang sama.

Lalu dimanakah posisi rakyat sebenarnya? Dewasa ini peran langsung rakyat banyak dilakukan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dalam bahasa asing disebut NGO (*Non-Governmental Organization*). NGO dianggap sebagai model yang jauh lebih kecil dari deviasi atau polarisasi mandat rakyat. Dibanding lembaga semacam partai politik, NGO atau LSM adalah re-presentasi kelompok masyarakat yang ingin menegaskan kedaulatannya sebagai kumpulan individu. LSM adalah simpul-simpul kesadaran dari masyarakat untuk tidak hanya menyerahkan nasibnya pada kontrak yang secara kodrati tidak selalu bisa dipenuhi oleh negara. Sejarah keberdayaan masyarakat dan perannya dalam perubahan

sosial, integrasi dan disintegrasi bangsa dapat pula dilihat dari fenomena Revolusi Perancis, abad ke-17, yang diikuti dengan *renaissance*. Substansi dari revolusi ini adalah: *egalite* (non-diskriminasi), *liberte* (kebebasan berpendapat), *fraternite* (solidaritas sosial).

John Locke (1632-1704) dengan sangat ekstrim mengatakan, kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan legislatif, yakni kekuasaan pemerintah negara untuk membentuk undang-undang. Tetapi tujuannya sebenarnya adalah untuk menegaskan bahwa kekuasaan itu ada di tangan rakyat melalui *volente general* yang banyak diartikan sebagai pemilihan umum. Tetapi kita tidak bisa lupa, titik jenuh dari proses ini akan kembali pada gerakan rakyat, artinya fungsi legislatif pun akan segera berakhir dan kembali kepada pemilikinya semula, yaitu rakyat, apabila tidak bisa menjalankan kontrak sosial secara konsisten. Disanalah peran LSM, yakni memastikan bahwa rakyat memiliki kedaulatannya lewat peran-peran sosial politik yang dilakukannya.

Lawatan Sejarah Sebagai Sumber Motivasi

Sejarah tentu tidak hanya dimengerti sebagai masa lampau saja. Dengan sejarah tidak menjadikan kita terbelenggu apalagi menyimpan dendam-dendam yang sewaktu-waktu muncul. Memang sejarah bangsa ini terus diwarnai konflik yang meli-

batkan sesama anak bangsa. Melawat ke masa lampau perjalanan masyarakat-bangsa ini justru berarti mengingatkan apa yang dapat kita hindarkan dan mana yang dapat kita pupuk terus sebagai sumber motivasi membangun kebersamaan untuk kesejahteraan bersama. Dalam konteks belajar kembali sejarah, kebersamaan justru yang prioritas dibangun melalui komitmen dan tindakan nyata. Dalam bahasa politik, kebersamaan adalah persatuan seperti juga telah menjadi modal perjuangan bangsa ini membebaskan diri dari penjajahan asing.

Dalam konteks inilah jaringan keindonesiaan dapat kita buat pe-tanya melalui tempat-tempat pengasingan para pejuang di berbagai daerah. Sejarah perjuangan mereka dapat dilacak pada situs-situs, bangunan bersejarah, dan lingkungan masyarakat tempatan. Masyarakat melalui sejarah lisan atau tradisi lisan masih menyimpan kenangan tentang para pejuang yang diasingkan ke daerahnya. Situs-situs sejarah itu merupakan diaspora menarik karena menunjukkan kemana mereka diasingkan. Tempat-tempat itu dalam hal ini hendak diidentifikasi sebagai simpul-simpul yang mempertautkan sejarah antar daerah yang memberi sumbangan pada terbentuknya keindonesiaan.

Sebagai langkah awal dapat diidentifikasi sejumlah simpul dimaksud seperti berikut. Bahwa pe-

ngasingan hingga wafat dan dimakamkannya Cut Nyak Dien di Sumedang pada tahun 1908 sudah banyak diketahui. Selain itu ada juga pengasingan pejuang wanita dari Aceh lainnya, Pocut Meurah Intan pada tahun 1907 hingga wafat dan dimakamkan di Blora pada 1937. Pejuang dari Minangkabau yang diasingkan ke Sukabumi pada 1936, adalah Haji Karim Amrullah. Sedangkan Tuanku Imam Bonjol satu abad sebelumnya pada tahun 1837, pertama diasingkan ke Cianjur, Ambon dan wafat dimakamkan di Manado. Pernah muncul silang pendapat bahwa yang diasingkan itu bukan Imam Bonjol yang asli.

Pangeran Diponegoro setelah perang usai pada tahun 1830 diasingkan mulau-mula ke Manado kemudian ke Makassar hingga wafat dan dimakamkan di sana 1855. Pejuang dari Kalimantan Selatan, Pangeran Hidayatullah diasingkan Belanda pada tahun 1862 ke Cianjur hingga wafatnya. Sementara itu dari Kalimantan Barat, Gusti Ahmad adalah putra Panembahan Sanggau yang dianggap membahayakan Belanda sehingga dibuang ke Purwakarta hingga wafatnya pada tahun 1895. Dari bagian utara Sulawesi, pejuang bernama Raja Jacob Ponto, keturunan Raja Siau, di kepulauan Sangir, ditangkap Belanda dan kemudian dibuang ke Kuningan Jawa Barat pada 1889. Dari Sulawesi Selatan, pejuang Bugis yang diasingkan ke Bandung pada 1905, adalah La Pawawoi Karaeng Segeri.

Dalam perjalanan biografinya, Sukarno setelah diadili pada tahun 1930 dipenjara di Banceuy dan Sukamiskin (Bandung) lalu dibuang ke Ende, Flores pada 1935 dan ke Bengkulu 1937. Pada saat Yogyakarta diduduki tentara agresi Belanda Desember 1949, ia bersama Haji Agus Salim dan Syahrir ditawan ke Prapat. Ia kemudian dipindahkan ke Bangka. Sementara itu Hatta, Syahrir, Iwa Kusuma Sumantri dibuang ke Digul lalu ke Banda Neira pada 1935. Hatta dan Syahrir pada akhir zaman Belanda diasingkan lagi ke Sukabumi (Februari-Maret 1942). dr. Cipto Mangunkusumo beserta keluarga telah lebih dahulu berada di kota ini setelah diasingkan di Neira. Masih banyak lagi tempat-tempat pengasingan atau pembuangan para pejuang bangsa pada masa penjajahan Belanda yang perlu diidentifikasi.

Adalah merupakan konsekuensi yang diterima para pejuang bangsa pada masa penjajahan Belanda untuk diasingkan dengan dasar hukum (*Exorbitant Rechten*). Yang penting dan menarik dicatat adalah bahwa pengertian diasingkan tidak berarti mereka terasing dalam kehidupan masyarakat tempatan. Sekedar contoh, dapat dikemukakan misalnya, Cut Nyak Dien meskipun dalam kondisi tuna netra masih sempat memberi pelajaran mengaji pada penduduk sekitar Sumedang. Sam Ratulangi mendirikan sekolah di Serui. Di tempat-tempat baru itu justru mereka merasa sebagai kam-

pung-kampung halaman baru yang kemudian bernama Indonesia. Kini tinggal lagi bagaimana kita bekerja keras membangun kembali Indonesia kita yang sedang menghadapi permasalahan pelik ini.

Mengunjungi secara langsung situs-situs bersejarah memang sangat baik, tetapi konsep Lawatan Sejarah dapat juga dituangkan ke dalam sebuah peta yang dapat membantu kita memahami sebuah perjalanan keindonesiaan melalui rajutan simpul-simpul perjuangan bangsa. Memang belajar sejarah tidak cukup hanya dengan buku teks, apalagi yang miskin ilustrasi. Lawatan Sejarah itu sendiri dapat berimplikasi pada perjalanan-perjalanan wisata Nusantara, yang tahun ini dicanangkan sebagai Gebyar Wisata Nusantara. Sungguh jika dikemas dengan baik Lawatan Sejarah bukan hanya berimplikasi pada kepariwisataan tetapi juga merupakan perjalanan yang dapat merekatkan simpul-simpul keindonesiaan.

Kesimpulan

Dengan demikian, integrasi atau disintegrasi sebenarnya ditentukan oleh proses timbal balik, pola hubungan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dengan negara yang diberi mandat melaksanakan kedaulatan. Sayangnya, sudut pandang yang dikembangkan pemerintah selama ini selalu menempatkan sikap "kritis" dan "cerdas" dari rakyat, terutama LSM

sebagai oposan pemerintah. Sementara dalam proses pemerintahan, rakyat hanya ditempatkan sebagai objek yang harus selalu menerima "tafsir kebenaran" tunggal dari negara. Akibatnya, struktur negara bersifat dominan dan mengabaikan substansi dari pertanyaan "untuk apa kita bernegara?"

1. Konstruksi filosofis negara adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat melalui "kontrak sosial" yang diwujudkan dalam pemilihan umum atau *volente generale*.
2. Kontrak sosial akan berakhir, apabila isi dari kesepakatan bersama yang berintikan pada asas keadilan, perdamaian dan kesejahteraan tidak bisa dilaksanakan oleh negara.
3. Integrasi atau dissintegrasi sangat ditentukan oleh kemampuan negara menjaga isi kontrak sosial dan kesepakatan bersama.
4. Kesepakatan bersama untuk hidup bernegara tidak bisa datang dari kekuasaan, tetapi dari kesadaran rakyat yang berharap akan keadilan, kesejahteraan dan perdamaian.
5. Kontrak sosial harus selalu diidentifikasi kembali secara terbuka dan sesuai dengan kebutuhan rakyat.

6. Rakyat, LSM atau lembaga apapun tidak akan mampu melakukan dissintegrasi bangsa. Yang mampu melakukan disintegrasi adalah ketidakadilan, diskriminasi, kemiskinan, dan penindasan, karena disanalah substansi masalahnya.

7. Program-program dengan tujuan mempertahankan integrasi bangsa akan gagal, apabila platformnya tidak sejalan dengan prinsip penghormatan hak-hak asasi manusia (HAM).

Integrasi bangsa tidak bisa dibangun melalui dogma, doktrin apalagi penindasan, melainkan lewat proses-proses partisipasi publik, negosiasi dan rekonstruksi kontrak sosial, sesuai kebutuhan jaman, dan redefinisi kesepakatan bersama atau *volente generale* agar relevansi "hidup bersama" itu selalu segar dan *up-to date*.

Adapun kebijakan yang diperlukan guna memperkuat upaya integrasi nasional adalah sebagai berikut :

- a. Membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu.
- b. Menciptakan kondisi yang mendukung komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu dan membiasakan

diri untuk selalu membangun konsensus.

- c. Membangun kelembagaan (pranata) yang berakarakan nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa, yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah.
- e. Upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan efektif.

Adapun strategi yang digunakan dalam penanggulangan disintegrasi bangsa antara lain:

- a. Menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air dan rasa persaudaraan, agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia.
- b. Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya primordialisme sempit pada setiap kebijaksanaan dan kegiatan, agar tidak terjadi KKN.
- c. Meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecahbelahan dari anasir luar dan kaki tangannya.

d. Penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butir-butir Pancasila, dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan kepada ideologi bangsa.

- e. Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi
- f. Membentuk satuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI dan Polri dalam memerangi separatis.
- g. Melarang, dengan melengkapinya dasar dan aturan shukum setiap usaha untuk menggunakan kekuatan massa.

Dari hasil analisis diperlukan suatu upaya pembinaan yang efektif dan berhasil, diperlukan pula tatanan, perangkat dan kebijakan yang tepat guna memperkuat integrasi nasional antara lain:

- a. Membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu.
- b. Menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus.
- c. Membangun kelembagaan (pranata) yang berakarakan nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa.

- d. Merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah.
- e. Upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan bijaksana, serta efektif.

Dari penjelasan diatas dapat-lah diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Disintegrasi bangsa, separatisme merupakan permasalahan kompleks, akibat akumulasi permasalahan politik, ekonomi dan keamanan yang saling tumpang tindih sehingga perlu penanganan khusus dengan pendekatan yang arif serta mengutamakan aspek hukum, keadilan, sosial budaya.
- b. Pemberlakuan Otonomi Daerah merupakan implikasi positif bagi masa depan daerah di Indonesia namun juga berpotensi untuk menciptakan mengentalnya heterogenitas dibidang SARA.
- c. Pertarungan elit politik yang diimplementasikan kepada penggalangan massa yang dapat menciptakan konflik horizontal maupun vertical harus dapat diantisipasi.

- d. Kepemimpinan dari elit politik nasional hingga kepemimpinan daerah sangat menentukan meredamnya konflik pada skala dini. Namun pada skala kejadian diperlukan profesionalisme aparat kemanan secara terpadu.
- e. Efek global, regional dengan faham demokrasi yang bergulir saat ini perlu diantisipasi dengan penghayatan wawasan kebangsaan melalui edukasi dan sosialisasi.

Saran

Untuk mendukung terciptanya keberhasilan suatu kebijaksanaan dan strategi pertahanan disarankan:

- a. Penyelesaian konflik vertikal yang bernuansa separatisme bersenjata harus diselesaikan dengan pendekatan militer terbatas dan profesional guna menghindari korban dikalangan masyarakat dengan memperhatikan aspek ekonomi dan sosial budaya serta keadilan yang bersandar pada penegakan hukum.
- b. Penyelesaian konflik horizontal yang bernuansa SARA diatasi melalui pendekatan hukum dan HAM.
- c. Penyelesaian konflik akibat peranan otonomi daerah

yang menguatkan faktor perbedaan, disarankan kepemimpinan daerah harus mampu meredam dan memperlakukan *reward and punishment* dari strata pimpinan di atasnya.

d. Guna mengantisipasi segala kegiatan separatisme ataupun kegiatan yang berdampak disintegrasi bangsa perlu dibangun dan ditingkatkan institusi inteligen yang handal.*

KEPUSTAKAAN

- Amirul Isnaini, Mayor Jenderal TNI, "*Mencegah Keinginan beberapa Daerah Untuk Memisahkan Diri dari Tegak Utuhnya NKRI*", Jakarta, Lemhannas, 2001.
- HB. Amiruddin Maulana, Drs, SH, Msi. "*Menjaga Kepentingan Nasional Melalui Pelaksanaan Otonomi Daerah Guna Mencegah Terjadinya Disintegrasi Bangsa*", Jakarta, Lemhannas, 2001.
- Marbun, "*Kamus Politik*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Rizasihbudi CS, "*Bara Dalam Sekam*" Identifikasi Akar Masalah dan Solusi Atas Konflik Lokal Di Aceh, Maluku, dan Riau, LIPI dan Kronik Indonesia Baru, Cetak I Januari 2001.
- Samuel P. Huntington, "*The Clash of Civilization remaking of World Order*" A Touchstone Book Published by Simon R Schuster. First Fouchstone Edition 1997.
- Sudrajat, MPA, Mayor Jenderal TNI, "*Mengatasi Gerakan Sparatis di Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Pendekatan Ketahanan Nasional*", Jakarta, Lemhannas, 2001.
- Surjanto, Brigadir Jenderal TNI, "*Mengatasi Gerakan Sparatis di Irian Jaya dengan Pendekatan Ketahanan Nasional*", Jakarta, Lemhannas, 2001.

Indeks Isi

Jurnal Politika Vol. 1 No. 1 Mei 2005 Eksperimentasi Politik Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi

♦ Syamsuddin Haris, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Otonomi Daerah* ♦ Saldi Isra, *Pilkada Langsung: Catatan Kritis atas Beberapa Isu dalam UU No. 32/2004* ♦ Muhammad Asfar, *Sistem Pilkada Langsung: Beberapa Problem, Implikasi Politik dan Solusinya* ♦ Anas Urbaningrum, *Antisipasi Masalah-Masalah Pilkada Langsung* ♦ Burhan D. Magenda, *Pilkada dalam Hubungan Pusat dan Daerah* ♦ M. Alfian Alfian M, *Hak Politik TNI dan Pilkada* ♦ Ferry Mursyidan Baldan, *Tidak Sekedar Mencari Legitimasi* ♦ Tinjauan Buku, *Strategi Memasarkan Daerah di Era Otonomi*. ♦

Jurnal Politika Vol. 1 No. 2 Agustus 2005 60 Tahun Indonesia Merdeka

♦ A. Eby Hara, *Nasionalisme Indonesia: dari Nasionalisme Lokal ke nasionalisme Kosmopolit* ♦ Teuku Kemal Fasya, *Nasionalisme Indonesia Tergugat, Nasionalisme Aceh Menggugat* ♦ M.A.L. Wanaha, *Papua dalam 60 Tahun Indonesia Merdeka* ♦ Aidul Fitriadi Azhari, *Koherensi dan Efektifitas Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Amandemen UUD 1945* ♦ Bustanul Arifin, *Pembangunan Pertanian Indonesia Selama 60 Tahun* ♦ Wawancara, Soedarmo Sasrosatomo, Sayidiman Suryohadiprojo, Budiman Sudjatmiko, Mustafa Kamal, Nurul Arifin ♦ Galeri Pendapat, Burhanuddin (JIL), Wahyuni Refi (GMNI), Heri Heryanto Azumi (PMII), Emmanuel Josafat Tular (PMKRI), Ahmad Rofiq (IMM), Kenly Poluan (GMKI), Hasanuddin (HMI) ♦ Tinjauan Buku, *Melecut Kebangkitan Bangsa-Bangsa Asia*. ♦

Jurnal Politika Vol. 1 No. 3 Desember 2005 Sekitar NKRI dan Federalisme

♦ Anhar Gonggong, *Bangsa-Negara Indonesia: Bentuk Negara dan Sistem Demokrasi yang Berubah-ubah* ♦ J. Kristiadi, *Jalan Berliku Menuju dan Mewujudkan Otonomi Khusus Papua* ♦ Suzie S. Sudarman, *Evolusi Sistem Federalisme Amerika Serikat* ♦ Widhyawan Prawiraatmadja, *Energy Security: Pengertian dan Relevansinya di Indonesia* ♦ Tinjauan Buku, *Negara Kuat versi Fukuyama*. ♦

